

# ANALISIS DAMPAK SOSIAL (ANDASOS) UNTUK UKURAN KINERJA PEMERINTAHAN

Oleh: Retor A.W. Kaligis\*

## Abstract

*All this time paradox occurs between economic development and social development. Social development wants all people have the right to earn a decent living, from the fulfillment of basic needs to the opportunity to develop their potential. If the economic development and social development is rated as two dichotomous entities, the progress of economic development to be built on the social costs of marginal group.*

*Related to social development, Social Impact Assessment (SIA) is required to analyze systematically the social impacts that may occur as the result of the development / project, both are retrospective and prospective. For that, SIA needs to have its own legal protection for the performance of government in improving the welfare and empowerment of the people to be more scalable, comprehensive, and accountable.*

*Keywords: social development, marginal group, social impact assessment*

## Abstrak

*Selama ini paradoks terjadi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Pembangunan sosial menginginkan semua orang memiliki hak untuk mendapatkan hidup yang layak, dari terpenuhinya kebutuhan dasar sampai kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Jika pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial dinilai sebagai dua entitas yang dikotomis maka kemajuan pembangunan ekonomi menjadi dibangun di atas biaya sosial kelompok marjinal.*

*Berkaitan dengan pembangunan sosial, Analisis Dampak Sosial (Andasos) diperlukan untuk menganalisis secara sistematis dampak sosial yang mungkin terjadi sebagai akibat pembangunan/proyek, baik bersifat retrospektif maupun prospektif. Untuk itu, Andasos perlu memiliki payung hukum tersendiri agar kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat menjadi lebih terukur, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.*

*Kata Kunci: pembangunan sosial, kelompok marjinal, analisis dampak sosial.*

## 1. Pendahuluan

Robert Chambers menyatakan, inti dari masalah kemiskinan terletak pada apa yang disebut sebagai *deprivation trap* atau jebakan kekurangan. *Deprivation trap* itu terdiri dari lima ketidakberuntungan yang melilit kehidupan keluarga miskin, yaitu (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) keterasingan, (4) kerentanan, dan (5) ketidakberdayaan. Kelima ketidakberuntungan itu saling terkait satu sama lain sehingga menjadi *deprivation trap*. Dari kelima jenis ketidakberuntungan ini, Chamber menganjurkan agar dua jenis ketidakberuntungan pada keluarga miskin yang patut diperhatikan, yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan, karena

keduanya sering menjadi sebab keluarga miskin menjadi lebih miskin.<sup>1</sup>

Kerentanan, menurut Chambers, dapat dilihat dari ketidakmampuan dari keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu untuk menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga itu. Kerentanan sering menimbulkan *poverty rackets* atau “roda penggerak kemiskinan” yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda yang berharga, sehingga keluarga itu menjadi semakin menderita menuju lembah kemiskinan. Sejumlah besar golongan “mendekati

<sup>1</sup> Susiana, Sali dan Yulia Indahri [Peny] (2000). *Pembangunan Sosial: Teori dan Implikasi Kebijakan*. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekjen DPR RI, h. 81-82

miskin” yang hidupnya hanya sedikit di atas garis kemiskinan sangat rentan terhadap turun naiknya perekonomian, sehingga perubahan kecil yang dialami mereka dapat menjerumuskan ke bawah garis kemiskinan.<sup>2</sup> Di Indonesia, jangankan akibat bencana alam seperti terjadi di Aceh, Yogyakarta, dan Padang atau adanya konflik sosial seperti terjadi di Poso dan Maluku, kenaikan sedikit saja dalam biaya hidup seperti yang diakibatkan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan tarif listrik maka orang yang “mendekati miskin” akan jatuh dalam kemiskinan.

Sedangkan ketidakberdayaan dimanifestasikan dari seringnya orang yang mempunyai kekuasaan memanipulasi keluarga miskin, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Ketidakberdayaan keluarga miskin ini membuat keluarga miskin menjadi lebih miskin.

Setidaknya terdapat 3 hal yang menyebabkan kerentanan dan ketidakberdayaan kaum miskin terus berlangsung. *Pertama*, indikator kemiskinan yang minimalis. Selama ini kriteria yang umum digunakan untuk melihat angka kemiskinan bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS). Kriteria yang ditetapkan BPS dalam menentukan kemiskinan penduduk, seperti luas dan jenis lantai hunian, tidak mampu membeli minimal satu setel setahun untuk setiap anggota keluarga, fasilitas air bersih dan MCK, serta konsumsi lauk pauk tidak bervariasi. Kriteria tersebut sangat minimalis, sehingga keluarga yang tidak mampu menyekolahkan anaknya untuk pendidikan 9 tahun dianggap bukan keluarga miskin. Atau jika mampu membeli pakaian satu setel per tahun, meski dengan kualitas seadanya dan dibeli di pasar loak, tidak masuk kriteria miskin. Selain berdampak pada tidak terungkapnya *kemiskinan riil* di masyarakat, dengan indikator semacam itu, persoalan kemiskinan tidak dikaitkan dengan masalah ketidakberdayaan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar sampai kesempatan untuk mengembangkan potensi diri dan keluarganya. Ketidakberdayaan keluarga miskin terlihat ketika memasuki sektor formal. Kemiskinan membuat mereka menjadi buruh dan terus menjadi miskin ketika menjadi buruh.

*Kedua*, tidak dipandang aspek pertumbuhan ekonomi dan aspek pemberdayaan rakyat sebagai satu kesatuan pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan tidak hanya dilihat dengan ukuran-ukuran

ekonomi, tapi juga aspek pemberdayaan yang sebetulnya bisa sejalan dan malah menunjang pertumbuhan ekonomi.

Selama ini kenaikan upah dianggap sebagai salah satu penyebab yang membuat iklim usaha di Indonesia menjadi kurang kompetitif. Padahal dengan adanya peningkatan produktivitas, buruh menjadi punya posisi tawar yang lebih kuat untuk memperoleh upah yang layak.

Secara nasional, pemerintah gencar menggerakkan industrialisasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi Lembaga Produktivitas Nasional yang dibentuk melalui Peraturan Presiden RI No. 50 Tahun 2005 Tentang Lembaga Produktivitas Nasional belum terlihat efektivitasnya mendorong produktivitas buruh. Di negara maju seperti Jepang, Australia, dan Inggris lembaga semacam itu menyusun tolok ukur, mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi para buruh secara sistematis dan berkesinambungan, kemudian dilakukan evaluasi.

Di Indonesia buruh masih cenderung berperan sebagai tukang atau operator mesin. Usaha untuk melakukan lompatan strategi industrialisasi tidak juga kunjung dilakukan. Industrialisasi yang dikembangkan tidak menitikberatkan pada penguasaan teknologi tinggi yang mensyaratkan penanaman modal melakukan alih teknologi.

*Ketiga*, pembangunan sektoral dan daerah yang tidak terintegrasi. Hal ini terlihat cukup menonjol dalam persoalan urbanisasi. Pemda DKI Jakarta menyatakan bahwa ibukota tertutup bagi para pendatang tanpa pekerjaan atau bekerja di sektor informal, padahal mereka datang ke kota besar akibat kehidupan di desa yang kian sulit. Ketika struktur ekonomi formal menggusur perekonomian rakyat di pedesaan, arus perpindahan antar sektoral dari sektor pertanian di pedesaan ke sektor informal di perkotaan menjadi konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Masyarakat pedesaan yang terpinggirkan kemudian ditolak keberadaannya di daerah perkotaan melalui tindakan penggusuran. Dengan demikian, penolakan terhadap para pendatang hanya berusaha menghambat bertambahnya penduduk miskin di suatu daerah (perkotaan), tetapi tidak mengatasi persoalan kemiskinan itu sendiri.

Dalam hal pembangunan kawasan industri sendiri juga terlihat lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah. Di Cina dan Vietnam ditetapkan standar kawasan industri yang didukung fasilitas sosial dan perumahan bagi

<sup>2</sup> *Ibid.*

buruh yang tidak jauh dari tempat kerja. Para pekerja biasa pulang-pergi naik sepeda, sehingga meski beban ekonomi buruhnya jauh dapat dikurangi. Tetapi di Indonesia, hasil penelitian penulis tahun 2003 di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa sebagai akibat kawasan industri tidak didukung fasilitas untuk karyawan, banyak buruh yang bekerja di Kecamatan Cikupa tetapi tinggal tersebar di berbagai Kecamatan di Tangerang, bahkan ada yang tinggal di Serang dan Jakarta. Hingga sekarang, keadaan tersebut tidak beranjak jauh.

Pemerintah sendiri tidak memiliki *data base* secara nasional daftar penduduk yang dikategorikan miskin yang dapat di *up date* setiap saat dan diakses setiap instansi pemerintahan. Akibatnya, program penanggulangan kemiskinan seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dari Depdagri, Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dari Departemen Pekerjaan Umum, dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Depsos, hingga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) seringkali salah sasaran.

## 2. Problem Pembangunan Sosial

Ukuran keberhasilan pemerintahan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih menitikberatkan pada kriteria-kriteria kemajuan ekonomi, sehingga aspek pembangunan sosial tidak menjadi bagian integral di dalamnya. Tapi dengan semakin berkembangnya indikator-indikator pembangunan sosial, yang lebih menekankan pada aspek kualitas hidup manusia, maka terlihat adanya inkonsistensi antara hasil pembangunan yang dicapai menurut indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, dengan penurunan jumlah penduduk miskin dan kaitannya dengan masalah kualitas hidup penduduk.

Vinod Thomas, *et.al* menyatakan:

“Pembangunan berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup rakyat, memperluas kemampuan mereka untuk membentuk masa depan mereka sendiri. Secara umum, pembangunan menuntut pendapatan per kapita yang lebih tinggi, tapi lebih jauh lagi mencakup pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih setara, kesetaraan jender yang lebih besar, kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, lingkungan alam yang lebih bersih dan lestari, sistem hukum dan pengadilan yang lebih adil, kebebasan politik dan sipil yang

lebih luas, kehidupan kultural yang lebih kaya”<sup>3</sup>

Kegagalan dalam pembangunan sosial akan menyebabkan kemiskinan di masyarakat. Amartya Sen menyebutkan:

*1) Poverty can be sensibly identified in terms of capability deprivation; the approach concentrates on deprivations that are intrinsically important (unlike low income, which is only instrumentally significant; 2) There are influences on capability deprivation -and thus on real poverty- other than lowness of income (income is not the only instrument in generating capabilities); 3) The instrumental relation between low income and low capability is variable different communities and even between different families and different individuals (the impact of income on capabilities is contingent and conditional).*<sup>4</sup>

Di zaman Orde Baru, selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJP-I), periode 1969-1993, ekonomi Indonesia secara nasional yang diukur dengan PDB tumbuh sekitar 6,8 persen per tahun (BPS, 1996:2). Tapi dengan diukur dengan Indeks Mutu Hidup (IMH) yang diukur dari tiga indikator komposit (angka kematian bayi, angka harapan hidup satu tahun, dan angka melek huruf), maka selama kurun waktu 1971-1990 hanya mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 2,6%.

Sejak tahun 1990, UNDP (The United Nations Development Programme) menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang terdiri dari indikator komposit harapan hidup (umur), pendidikan (melek huruf dan rata lama sekolah), dan standar hidup (daya beli) untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Menurut laporan UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development*

<sup>3</sup> Thomas, Vinod, Mansoor Dailami, Ashok Dhareshwar, Daniel Kaufmann, Nalin Kishor, Ramon Lopez, dan Yan Wang (2000). *Kualitas Pertumbuhan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, h. xxix-xxx.

<sup>4</sup> Sen, Amartya (1999). *Development As Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, Inc, h. 87-88.

*Indeks*), Indonesia menempati rangking ke 108 dari 169 negara (2010) dan turun menjadi rangking 124 dari 187 negara (2011).

Bangsa kita perlu belajar dari kesalahan bahwa selama kurun waktu 1970-1996 jumlah penduduk miskin yang turun dari sekitar 70 juta jiwa (60% penduduk) menjadi sekitar 22 juta jiwa (11,4%), kemudian akibat masalah kerentanan dan ketidakberdayaan masyarakat menyebabkan setelah krisis ekonomi melonjak menjadi 79,4 juta jiwa (38%) tahun 1998.

Setiap tahun sekitar dua juta pencari kerja baru memadati pasar lapangan kerja, padahal pertumbuhan ekonomi hanya menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang terbatas. Pertumbuhan sektor informal pun tak terbendung dan dianggap sebagai beban pembangunan.

Padahal berkembangnya sektor informal di Indonesia berawal dari strategi pemerintahan Orde Baru yang selalu mengedepankan pembangunan ekonomi Indonesia tanpa diikuti oleh pembangunan sektor lain, terutama pembangunan di bidang sosial. Di tingkat makro atau komunitas, misalnya, dampak langsung pelaksanaan pembangunan dirasakan kurang mempertimbangkan unsur manusianya, tetapi lebih ditekankan pada target pembangunan itu sendiri. Ditambah lagi, pendekatan pembangunan ditandai dengan penekanan pada pendekatan birokrasi yang bersifat dari atas ke bawah (*top down*). Otonomi daerah cenderung tidak berbanding lurus dengan pemberdayaan masyarakat lokal.

Penguasaan kekayaan alam tetap belum diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pertumbuhan sektor perkebunan dan pemberian hak penguasaan hutan (HPH) banyak menimbulkan konflik agraria di berbagai daerah. Laporan utama Harian *Kompas*, 20-22 Februari 2012, secara berturut-turut melaporkan usaha pertambangan pada umumnya lebih menguntungkan pejabat dan pengusaha, serta tidak memberikan kesejahteraan kepada warga sekitar. Perizinan tambang dikaitkan dengan politik lokal, yaitu suksesi dan akhir masa jabatan kepala daerah. Rakyat yang terpinggirkan hanya menerima dampak negatifnya, mulai dari pelanggaran aturan dan hukum, konflik sosial dan horizontal, kerusakan lingkungan tidak terkendali, hingga eksekusi kriminal dan kekerasan.

Paradigma pembangunan dengan pertumbuhan yang menjadi jiwa pembangunan di segala bidang menempatkan ekonomi sebagai sektor utama tidak memberi tempat yang layak

pada pemerataan dan kualitas pembangunan itu sendiri. Bila dilihat dari tingkat pendapatan, maka terjadi kesenjangan antara kelompok berpenghasilan rendah dan kelompok berpenghasilan tinggi. Sedangkan, jika dilihat dari tingkat pertumbuhan wilayah, terjadi pula kesenjangan antar wilayah pembangunan, termasuk kesenjangan pembangunan antar sektor.

Sejak Orde Baru ketika REPELITA menekankan ekonomi perkotaan yang bertumpu pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor sehingga peran sektor pertanian berkurang, arus perpindahan antar-sektoral terjadi dari sektor pertanian di pedesaan ke sektor informal di perkotaan. Hasil temuan Sajogjo menunjukkan, migrasi desa-kota di Jawa terjadi secara besar-besaran pada tahun 1980-an sebagai reaksi terhadap perkembangan industri padat karya yang membutuhkan buruh yang memiliki sedikit keterampilan atau bahkan tidak sama sekali. Sedangkan pada tahun 1990-an, penduduk yang berpindah ini mewakili populasi yang tidak dapat berpartisipasi dalam ekonomi pertanian pedesaan yang semakin menurun sehingga terpaksa mencari kesempatan hidup yang lebih baik di daerah perkotaan.<sup>5</sup>

Banyaknya kaum urban dianggap menambah beban kota-kota besar dalam daya tampung kerja, masalah tanah dan rumah, air bersih, dan sebagainya. Ketika tidak semua kaum urban dapat tertampung di sektor formal, maka sektor informal tumbuh dengan subur. Hingga 14 tahun era reformasi, persoalan penanganan keberadaan kaum urban di sektor informal terus menghinggapi kota-kota besar. Kita bisa melihat terjadinya konflik antara aparat dengan para kaum urban dan sektor formal versus sektor informal. Konflik tersebut tidak bisa diatasi dengan serta merta mengusir mereka dari sektor informal atau menempuh prosedur hukum, sehingga akibatnya konflik akan terus berulang. Padahal daya tampung ibukota juga memiliki keterbatasan untuk merangkul sektor informal begitu saja. Sedangkan jika ditolak secara membabi buta, hal ini juga tidak manusiawi karena dengan sulitnya hidup di luar perkotaan arus pendatang juga semakin banyak untuk mengadu peruntungan. Urbanisasi sulit ditekan karena merupakan bagian dari ketidakberhasilan pembangunan sosial.

<sup>5</sup> Sajogjo. "Pertanian dan Industrialisasi dalam Pembangunan Rural", dalam Frans Husken, *et.al.* (1997). *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial: Indonesia di Bawah Orde Baru*. Jakarta: KTIILV & PT. Gramedia.



### 3. Peran Analisis Dampak Sosial (Andasos)

Dalam menganalisis secara sistematis dampak sosial yang mungkin terjadi sebagai akibat pembangunan/proyek, baik bersifat retrospektif maupun prospektif, digunakan Analisis Dampak Sosial (Andasos). Andasos atau *Social Impact Assessment* (SIA) didefinisikan sebagai analisa tentang keadaan sosial yang lalu dan sekarang serta perkiraan akibat dimasa depan disertai dengan intervensi terhadap interaksi dan pola hubungan antar anggota masyarakat.<sup>6</sup>

Riga Adiwoso menjelaskan, SIA atau Andasos berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an yang merupakan hasil perhatian ilmuwan dan praktisi untuk memahami dampak sosial dan lingkungan dari pembangunan industri dan eksplorasi sumber daya alam. Perhatian ini berkembang karena adanya ketergantungan yang berlebihan pada kriteria-kriteria ekonomi dalam mengukur konsep yang dikenal sebagai “kualitas manusia”. Hasil nyata dari reaksi terhadap “*economic philistinism*” adalah gerakan indikator sosial dan gerakan ekologi. Kedua gerakan ini berangkat dari asumsi bahwa perspektif ekonomi yang berlebihan terhadap perubahan teknologi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi mengesampingkan faktor sosial dan lingkungan yang penting dan juga kurang memperhatikan dampak terhadap manusianya.<sup>7</sup>

Untuk memberikan perspektif yang komprehensif, analisis lingkungan biogeofisik dari pembangunan mencoba memperluas batasannya dengan memasukkan aspek sosio ekonomi ke dalamnya, namun terjadi kepincangan karena ilmuwan bidang tersebut yang tertarik pada aspek sosial kurang berhasil mengembangkan pengetahuan ilmu-ilmu sosial ke dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Hal ini telah mendorong ilmuwan sosial untuk mengembangkan Andasos yang menekankan pemisahan aspek sosial, demografi maupun ekonomi dari aspek biogeofisik agar dapat memberikan perhatian yang sepadan.<sup>8</sup>

Pada perkembangannya, Amdal dan Andasos makin terlihat sebagai kegiatan berbeda. Misalnya, dalam kebijakan tata kota, analisis dampak bisa dilakukan untuk menilai apakah

pembangunan yang dilakukan merusak ekosistem (dampak lingkungan), menyebabkan migrasi berikut masalah-masalah sosialnya (dampak sosial), atau meningkatkan harga tanah di kawasan tertentu (dampak ekonomi).

Andasos tidak perlu selalu dilihat sebagai subset dari kegiatan analisis dampak lingkungan, tetapi sebagai analisis bagi kegiatan pembangunan secara umum. Di Amerika Serikat, Andasos yang pada mulanya menjadi bagian dari Amdal pada awal tahun 1970-an, akhirnya berkembang tanpa dikaitkan dengan Amdal. Sama halnya dengan di Eropa, Andasos telah berkembang sebagai bentuk khusus dari analisis kebijakan.<sup>9</sup>

Namun secara legalitas di Indonesia, Andasos masih menjadi bagian dari Amdal. Dalam pengkajian aspek sosial pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 dibagi dimensi pokok aspek sosial, yakni sosial ekonomi dan sosial budaya. Setelah keluarnya PP No. 51 Tahun 1993, maka diterbitkan peraturan dibawahnya yakni Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 299/11/1996 Tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1993 direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 di mana dimensi pokok aspek sosial mencakup pula kesehatan masyarakat.

Sebagai implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan diterbitkan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. Salah satu kemajuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 adalah semakin besarnya ruang bagi keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat terkena dampak dalam hal penentuan keputusan mengenai layak tidaknya rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut. Permohonan izin lingkungan dan penerbitan izin lingkungan harus diumumkan tiga kali dalam tahap perencanaan. Berbeda dengan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 hanya mewajibkan satu kali pengumuman saja yaitu pada tahap sebelum menyusun kerangka acuan Amdal. Namun di sini, Andasos masih merupakan bagian dari Amdal.

Riga Adiwoso mengidentifikasi suatu kerangka pemikiran yang melihat hubungan antara aspek-aspek yang terkait dalam pembangunan, yang berasal dari gerakan indikator sosial dan

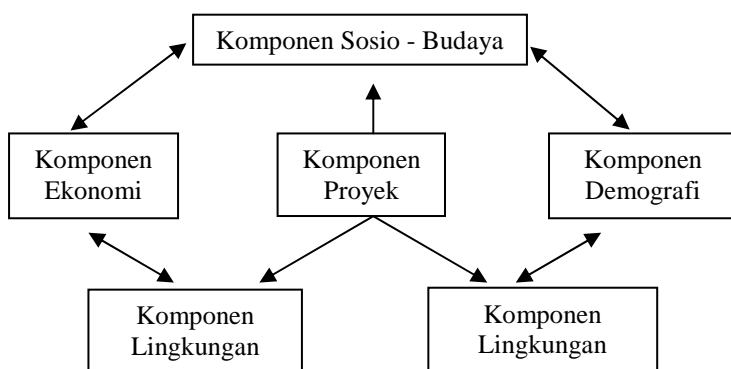
<sup>6</sup> Burdge, Rabel J. and Desmon M.Connor (1994). *Social Impact: Assessment and Management*. Washington DC: The American Sociological Association.

<sup>7</sup> Hikmat, Harry (2000). *Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centred Development)*, makalah kuliah Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial-UI Jakarta, h. 10.

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 10-11.

<sup>9</sup> Becker, Henk (1997). *Social Impact Assessment*. London: University College London Press, h. 189.

berdasarkan konsep kualitas hidup (*quality of life*) serta kemaslahatan sosial (*well being*). Menurut Riga ada 6 aspek utama dalam Andasos, yaitu: aspek sosial budaya, aspek demografi, aspek ekonomi, aspek lingkungan binaan, aspek lingkungan alam, dan aspek proyek, yang hubungannya dapat dilihat dapat pada gambar di bawah. Dari 6 komponen yang berkaitan tersebut, dalam Analisis Dampak Sosial, komponen intinya ada 3 komponen, yaitu sosio budaya, demografi, dan ekonomi. Untuk dampak sosial dilihat hubungan intra-komponen inti dan hubungan inter komponen inti dengan komponen proyek, lingkungan alam, dan lingkungan binaan. Dengan demikian, suatu Analisis Dampak Sosial baru dianggap lengkap, bila dapat menyajikan informasi mengenai dampak yang diperkirakan yang menyangkut komponen inti tersebut.<sup>10</sup>



**Gambar: Hubungan Antar Aspek Utama dalam Analisis Dampak Sosial**

Tiga komponen inti tersebut diidentifikasi Riga menjadi subkomponen-subkomponen sebagai berikut:<sup>11</sup>

a. **Komponen Sosio-Budaya:**

- Organisasi budaya dan cara hidup sehari-hari yang menyangkut jenis pranata yang ada dalam suatu komunitas, adat-istiadat, norma dan tata cara, dan pengelompokan masyarakat. Dilihat juga pola interaksi antar-subkomponen.
- Nilai, sikap, dan persepsi: baik antar-kelompok maupun mengenai kegiatan yang direncanakan.
- Distribusi kekuasaan dan kehidupan politik: pembagian kekuasaan yang berlaku dalam

masyarakat tertentu serta pergeseran kekuasaan dalam masyarakat.

- Struktur stratifikasi: berbagai stratifikasi menurut berbagai pranata yang ada, misalnya struktur stratifikasi sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan agama dalam suatu masyarakat.
- Peranan dalam masyarakat, yang menyangkut juga masalah kesempatan peranan dan tingkat spesialisasi yang ada dan diperlukan.
- Integrasi atau keserasian: melihat proses sosial yang dapat memelihara, mencegah atau merusak keserasian.
- Hubungan dengan daerah, atau lokasi lainnya: keterkaitan yang ada antara masyarakat, di mana kegiatan pembangunan akan diadakan, dengan masyarakat di luar lokasi tersebut, baik hubungan yang bersifat sosial, politik, maupun ekonomi.
- Pranata dan fungsinya dalam masyarakat yang erat hubungannya dengan subkomponen organisasi budaya dan cara hidup sehari-hari. Dilihat jenis dan jaringan hubungan dalam setiap pranata.
- Pengalaman dengan perubahan sosial: tingkat kesanggupan masyarakat menangani perubahan yang datang dari luar serta cara-cara penanganan perubahan.
- Masalah sosial: jenis-jenis masalah sosial yang ada serta penanganannya di masyarakat.
- Kesehatan lingkungan yang dipengaruhi oleh ciri kependudukan, cara hidup, penggunaan sumber daya, keadaan biofisik serta risiko suatu proyek.
- Penggunaan sumber daya (produksi-distribusi-pola konsumsi). Teknologi yang digunakan dalam suatu kegiatan pembangunan dapat merubah pola konsumsi setempat yang selanjutnya merubah cara hidup sehari-hari maupun penggunaan lahan/ tanah.
- Lingkungan binaan: perubahan pada lingkungan binaan akan membawa dampak perubahan persepsi, orientasi, rasa kenyamanan, dan interaksi sosial.
- Demografi: peningkatan mobilitas penduduk yang dapat memberi dampak perubahan terhadap struktur dan stratifikasi sosial dalam masyarakat dan terutama terhadap hubungan antara pendatang dan penduduk asli.

<sup>10</sup> Hikmat, Harry (2000). *Analisis Dampak Lingkungan Sosial*, *op.cit*, h. 12.

<sup>11</sup> Hikmat, Harry (2000). *Analisis Dampak Lingkungan Sosial*, *op.cit*, h. 12-14.

b. Komponen Kependudukan:

- Jumlah Penduduk, dengan asumsi semakin besar jumlah penduduk dan semakin banyak diferensiasi kerja yang ada di suatu lokasi kegiatan pembangunan, semakin kecil intensitas dampak sosial yang diperkirakan, karena proyek dapat menggunakan tenaga kerja setempat.
- Kepadatan penduduk dan komposisi penduduk di lokasi, untuk memperkirakan besaran dampak, stres atau konflik, dari kegiatan pembangunan yang direncanakan.
- Jarak lokasi dari pusat daerah atau kota metropolitan, dengan asumsi bahwa kota besar lebih mudah dapat menyerap dampak sosial suatu kegiatan.
- Keanekaragaman penduduk di lokasi, dengan asumsi bahwa semakin beraneka ragam penduduk di suatu lokasi, semakin menjadi kurang menyolok kehadiran pendatang, karenanya perbedaan pendatang dan penduduk asli berkurang. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa semakin beranekaragam semakin tinggi toleransi pada perubahan.
- Pola perubahan penduduk, untuk memperkirakan tenaga kerja yang tersedia bagi kegiatan pembangunan yang direncanakan.

c. Komponen Ekonomi:

- Perubahan pendapatan, yang akan menyebabkan perubahan daya beli penduduk sehingga merubah cara hidup sehari-hari.
- Daya serap dan komposisi tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi, yang mempengaruhi struktur stratifikasi serta kehidupan masyarakat setempat.
- Perpajakan, yang menentukan gaya hidup sehari-hari dari masyarakat dan perubahan karena kegiatan pembangunan pada sistem atau pelaksanaan perpajakan akan membawa dampak sosial.
- Pola kegiatan di setiap sektor ekonomi, yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, dan mempengaruhi keadaan sosial dari masyarakat tersebut.

Melalui Andasos diinventarisir aspek-aspek yang berpengaruh terhadap dampak sosial. Dengan demikian dapat dilihat kecenderungan masalah sosial yang terjadi di masyarakat, seperti

peningkatan jumlah pengangguran, masalah kriminalitas, meningkatnya depresi, dan semakin menyebarkan prostitusi.

Untuk itu, dalam rangka pembangunan sosial, Andasos seharusnya ditempatkan sebagai acuan tanpa selalu menjadi bagian dari Amdal sebagai ukuran kinerja pemerintahan pusat dan daerah. Dengan keberadaan Andasos tersebut, pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial dinilai sebagai dua entitas yang tidak terpisah satu sama lain.

#### 4. Penutup: Kesimpulan dan Saran

Hingga saat ini pemerintah belum mampu mengatasi paradoks antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Pembangunan sosial mengedepankan hak terhadap pembangunan dan hak asasi lainnya, serta hak dan tanggungjawab sosial untuk kemajuan bagi semua. Artinya, semua orang memiliki hak untuk mendapatkan hidup yang layak, dari terpenuhinya kebutuhan dasar sampai kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya.

Jika pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial dinilai sebagai dua entitas yang dikotomis maka pembangunan tidak menampilkan perubahan yang menyeluruh. Hal ini memarjinalkan golongan yang tidak mempunyai akses terhadap kebijakan, sumber-sumber politik dan ekonomi. Akibatnya, kemajuan pembangunan ekonomi menjadi dibangun di atas biaya sosial kelompok marjinal yang disisihkan dari proses pembangunan.

Berkaitan dengan pembangunan sosial, secara legalitas, Andasos perlu memiliki payung hukum tersendiri baik melalui Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah, untuk mengukur kinerja pemerintahan pusat dan daerah, serta proyek pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan rakyat menjadi lebih terukur, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Becker, Henk (1997). *Social Impact Assessment*. London: University College London Press.

Burdge, Rabel J. & Desmon M.Connor (1994). *Social Impact: Assessment and Management*. Washington DC: The American Sociological Association.

Hikmat, Harry (2000). *Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centred Development)*, makalah kuliah Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial-UI Jakarta.

Husken, Frans, *et.al.* (1997). *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial: Indonesia di Bawah Orde Baru*. Jakarta: KTILV & PT. Gramedia.

Sen, Amartya (1999). *Development As Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, Inc.

Susiana, Sali dan Yulia Indahri (Peny.) (2000). *Pembangunan Sosial: Teori dan Implikasi Kebijakan*. Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekjen DPR RI.

Thomas, Vinod, Mansoor Dailami, Ashok Dhareshwar, Daniel Kaufmann, Nalin Kishor, Ramon Lopez, dan Yan Wang (2000). *Kualitas Pertumbuhan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

### Lain-lain:

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL.

*Kompas*, 20 Februari 2012.

*Kompas*, 21 Februari 2012.

*Kompas*, 22 Februari 2012.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**\*Dr. Retor AW Kaligis, M.Si.**

Menyelesaikan S1 di Jurusan Jurnalistik, FIKOM, Universitas Padjadjaran (1994), S2 Sosiologi, Kekhususan Manajemen Pembangunan Sosial-FISIP, Universitas Indonesia (2003), dan S3 Sosiologi-FISIP, Universitas Indonesia (2010). Pemimpin Redaksi Jurnal Ilmiah INSANI STISIP (Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Widuri.

email : retor\_awk@yahoo.com

**”Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan tidak ada”.**

**(Mohammad Hatta)**